

## PERAN INKLUSI KEUANGAN DALAM MENDORONG *GREEN ECONOMY* DI IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Fauziah Nur Khasanah Tri Jaya<sup>1</sup>, Mirzam Arqy Ahmadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>1</sup>[b100210371@student.ums.ac.id](mailto:b100210371@student.ums.ac.id)

### Abstract

*This research examines the role of financial inclusion in facilitating the transition to a green economy in the capital city of the Archipelago (IKN). This research is situated within the context of the planned relocation of Indonesia's capital city, which is anticipated to serve as a model for a sustainable and environmentally conscious urban centre. This research aims to elucidate the influence of financial inclusion on the transition to a green economy, as well as the challenges and benefits of financial inclusion in this process. The research method employed is a qualitative approach, with secondary data collected from academic journals, government reports, and relevant case studies. The findings indicate that financial inclusion plays a pivotal role in promoting the utilization of renewable energy and green practices in NI, despite the persisting challenges pertaining to financial literacy and infrastructure. Further discussion reveals the necessity for collaboration between the government, the private sector and communities in order to optimize the potential of financial inclusion in supporting the green economy.*

**Keywords:** *financial inclusion, green economy, Capital City of the Archipelago, sustainability, renewable energy, financial literacy.*

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran inklusi keuangan dalam mendorong penerapan ekonomi hijau di Ibu Kota Nusantara (IKN). Latar belakang penelitian ini didasari oleh proyek perpindahan ibu kota Indonesia yang diharapkan menjadi model kota berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh inklusi keuangan terhadap transisi menuju ekonomi hijau, serta tantangan dan peluang yang ada dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data sekunder dari jurnal akademik, laporan pemerintah, dan studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki peran penting dalam mendorong penggunaan energi terbarukan dan praktik ramah lingkungan di IKN, meskipun masih ada tantangan terkait literasi keuangan dan infrastruktur. Pembahasan lebih lanjut

### Article History

Received: January 2025

Reviewed: January 2025

Published: January 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

mengungkapkan perlunya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memaksimalkan potensi inklusi keuangan dalam mendukung ekonomi hijau.

**Kata Kunci:** inklusi keuangan, ekonomi hijau, Ibu Kota Nusantara, keberlanjutan, energi terbarukan, literasi keuangan.

## PENDAHULUAN

Indonesia sedang menghadapi perubahan besar dengan perpindahan ibu kotanya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Proyek besar ini diharapkan tidak hanya memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi model bagi pengembangan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan. Seiring dengan hal tersebut, inklusi keuangan memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan visi “*smart, green, beautiful, dan sustainable*” yang dikutip dari laman resmi Republik Indonesia (Wisnubroto, 2023). Akses yang lebih luas ke layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha di sekitar IKN dapat membantu mempercepat transisi menuju *green economy*, dengan mendorong penggunaan energi terbarukan, praktik ramah lingkungan, dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien.

Pemerintah Indonesia menargetkan IKN sebagai kota pintar dan hijau, di mana inovasi teknologi dan keberlanjutan menjadi prioritas utama. Dalam konteks ini, inklusi keuangan sangat relevan untuk memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha dan komunitas lokal, terutama yang berkaitan dengan proyek-proyek berwawasan lingkungan. Dengan dukungan keuangan yang memadai, masyarakat dapat mengakses produk dan layanan hijau, seperti kendaraan listrik, sistem energi surya, dan teknologi pertanian berkelanjutan. Ini memungkinkan penduduk lokal untuk berpartisipasi dalam membangun ekonomi hijau yang inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan di kawasan IKN.

Namun, tantangan dalam mewujudkan *green economy* di IKN juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat lokal, khususnya UMKM, dapat diintegrasikan dalam ekosistem pembangunan ekonomi yang inklusif. Di sinilah inklusi keuangan berperan, dengan menyediakan solusi pembiayaan yang fleksibel dan terjangkau bagi sektor-sektor ekonomi yang relevan (Schiffer & Weder, 2001). Misalnya, pembiayaan hijau atau kredit berbasis lingkungan dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong usaha-usaha kecil menengah beralih ke praktik yang lebih ramah lingkungan. Hal ini akan mendukung pembangunan berkelanjutan di IKN, serta menciptakan lapangan kerja baru yang berkontribusi pada ekonomi hijau nasional.

Pembangunan IKN juga menawarkan peluang besar bagi inovasi dalam sektor keuangan, terutama dalam hal pengembangan *fintech* yang mendukung inklusi keuangan hijau. Dengan meningkatnya adopsi teknologi digital, layanan keuangan berbasis teknologi seperti *mobile banking* dan *e-wallet* dapat lebih mudah menjangkau masyarakat di daerah terpencil sekitar IKN. Ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital yang sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan melalui transaksi dan investasi yang lebih hijau dan ramah lingkungan.

Dalam rangka memaksimalkan dampak positif dari inklusi keuangan terhadap *green economy* di IKN, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting. Regulator keuangan perlu merancang kebijakan yang mendukung akses ke layanan keuangan yang ramah lingkungan, sementara lembaga keuangan dapat mengembangkan produk-produk yang mendukung inisiatif hijau. Dengan demikian, IKN dapat menjadi contoh nyata bagaimana pembangunan ekonomi, inklusi keuangan, dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan beriringan, menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Inklusi Keuangan (*Financial Inclusion*)**

Menurut (Durai & Stella, 2019), inklusi keuangan ialah proses memastikan bahwa individu dan bisnis memiliki akses yang memadai ke layanan keuangan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk layanan pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi. Dikutip dari *website* resmi OJK (OJK, n.d.), Bank Dunia mendefinisikan inklusi keuangan sebagai kemampuan individu untuk mendapatkan layanan keuangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK No. 76/POJK.07/2016, inklusi keuangan dapat didefinisikan sebagai ketersediaan akses terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan akses ini juga didukung oleh peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistem, produk, dan layanan jasa keuangan, serta ketersediaan layanan jasa keuangan formal. Dalam rangka memastikan produk, sistem, dan layanan jasa keuangan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, beberapa faktor yang harus diperhatikan antara lain keterjangkauan, efektifitas dan efisiensi, serta kualitas (BCA, 2023). Dalam konteks Ibu Kota Nusantara (IKN), inklusi keuangan akan menjadi salah satu instrumen utama untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif dan mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

### **2. Ekonomi Hijau (*Green economy*)**

Konsep Ekonomi Hijau adalah konsep multidimensi yang berfokus pada pertukaran dan sinergi antara dimensi ekonomi dan lingkungan, dengan perbedaan utama pada fokus dan batasan lingkungan (Merino-Saum et al., 2020). Ekonomi hijau bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan mengubah ekonomi tradisional saat ini menjadi sistem yang menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan, mengurangi polusi, dan memerangi perubahan iklim (Souad, 2023). Menurut *United Nations Environment Programme* ((UNEP, n.d.), Ekonomi hijau adalah ekonomi yang rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial. Ini mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan melalui investasi pemerintah dan swasta dalam berbagai kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan aset. Investasi ini meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya, mengurangi polusi dan emisi karbon, dan mencegah kehilangan layanan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Teori ekonomi hijau menekankan perlunya mengintegrasikan faktor lingkungan dalam kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang ramah lingkungan. Dalam kaitannya dengan

pembangunan IKN, *green economy* akan menjadi dasar dari model pembangunan kota yang berkelanjutan, di mana setiap sektor ekonomi diharapkan untuk mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan infrastruktur hijau.

### 3. Teori Pembiayaan Hijau (*Green Financing*)

Finansial hijau meliputi, tetapi tidak terbatas pada, pembiayaan terkait iklim; cakupannya juga meliputi berbagai tujuan lingkungan lainnya, seperti pengendalian polusi industri, pengelolaan polusi air, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Istilah ini juga mengacu pada investasi keuangan yang dialokasikan untuk proyek dan inisiatif pembangunan berkelanjutan, produk-produk ramah lingkungan, serta kebijakan yang mendukung terciptanya ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pembiayaan untuk mitigasi dan adaptasi khususnya berhubungan dengan kegiatan yang menanggapi perubahan iklim: mitigasi aliran keuangan merujuk pada investasi dalam proyek atau program yang bertujuan mengurangi atau mencegah emisi gas rumah kaca (GHG) (Srivastava et al., 2020). Secara teoritis, *green finance* memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi investasi perusahaan. Namun, dampak dari elemen "*green*" dan "*finance*" dalam pembiayaan bisa bertentangan di situasi tertentu. Pada tahap awal pengembangan industri energi terbarukan, keterbatasan kredit yang timbul dari aspek "*finance*" dapat menetralkan manfaat dari aspek "*green*" dalam meningkatkan efisiensi investasi di sektor energi terbarukan. Oleh sebab itu, pengaruh *green finance* terhadap efisiensi investasi perusahaan energi terbarukan tidak selalu jelas (He et al., 2019). Tujuan utama dari *green finance* adalah untuk menyediakan dana bagi bisnis yang mendukung keberlanjutan lingkungan serta membatasi pembiayaan untuk perusahaan yang terlibat dalam kegiatan yang merusak atau mencemari lingkungan (Sulistiyowati, 2024). Melalui pembiayaan proyek yang berfokus pada pengurangan emisi karbon dan pelestarian lingkungan, keuangan hijau memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan ekonomi dunia (Ardita & Ahmadi, 2024). Di dalam pembangunan IKN, pembiayaan hijau dapat memainkan peran krusial dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur hijau, termasuk gedung-gedung berenergi rendah, transportasi publik berbasis listrik, serta pengelolaan limbah yang efisien.

### 4. Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Konsep pembangunan berkelanjutan pada dasarnya menekankan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh generasi saat ini tidak boleh mengorbankan kesejahteraan generasi mendatang. Pengorbanan tersebut dapat berupa penurunan kesejahteraan sosial dibandingkan dengan generasi saat ini. Kesejahteraan sosial yang dimaksud meliputi kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial yang mencakup kesehatan dan pendidikan, serta kesejahteraan lingkungan (Suparmoko, 2020). Pembangunan berkelanjutan adalah teori yang mendukung keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Teori ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus dilakukan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Prinsip pembangunan berkelanjutan sangat relevan dalam konteks IKN yang ingin menjadi ibu kota dengan konsep *green city*. Inklusi keuangan dalam hal ini berfungsi untuk mendukung masyarakat dan pelaku bisnis dalam mengakses dana

yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang lebih ramah lingkungan, sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan alam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam hubungan antara inklusi keuangan dan ekonomi hijau di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pendekatan ini dipilih karena dapat menggali wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana akses ke layanan keuangan mempengaruhi transisi menuju ekonomi hijau, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapannya. Data sekunder dikumpulkan dari literatur yang relevan, seperti jurnal akademik, laporan kebijakan, studi sebelumnya, laporan pemerintah, dan data statistik terkait inklusi keuangan dan ekonomi hijau di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan IKN. Laporan keuangan dari lembaga keuangan dan studi kasus dari negara lain yang telah menerapkan konsep *green economy* juga akan digunakan sebagai perbandingan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Melalui penelitian ini, peneliti akan mengkaji penelitian terdahulu yang relevan dengan judul “Peran Inklusi Keuangan dalam Mendorong *Green economy* di Ibu Kota Indonesia Negara (IKN)” antara lain penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2024), membuktikan bahwa integrasi ekosistem bisnis digital dan keberlanjutan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan bisnis berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Jelas bahwa faktor-faktor utama seperti inklusi digital, inovasi berkelanjutan, dan kemitraan multi-pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah, perusahaan, dan organisasi non-pemerintah harus bekerja sama untuk menciptakan kebijakan dan praktik bisnis yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Untuk mencapai pembangunan ekonomi jangka panjang yang bermanfaat bagi masyarakat, kita harus membangun jaringan bisnis digital yang komprehensif, berpikiran maju, dan ramah lingkungan. Dengan memprioritaskan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, para pemangku kepentingan dapat membuat perbaikan jangka panjang yang akan menguntungkan generasi mendatang.

Penelitian yang dilakukan oleh Lumbanraja & Lumbanraja (2023), secara jelas menunjukkan bahwa variabel ekonomi hijau memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Indonesia (2011-2020), dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen. Hal ini membuktikan bahwa penerapan ekonomi hijau secara pasti akan meningkatkan pertumbuhan negara. Studi empiris tersebut juga mengungkapkan bahwa pembangunan negara di masa depan harus mengadopsi sistem hijau. Sistem ini perlu berfokus pada arah, kebijakan, organisasi, wilayah, kapasitas, dan intervensi dari setiap pihak. Dengan demikian, aktivitas ekonomi Indonesia akan lebih memperhatikan kondisi lingkungan.

Aulya et al. (2024) melakukan penelitian definitif yang menganalisis pengaruh inovasi digital dan ekonomi hijau terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Hasil penelitian mereka jelas: inovasi digital memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini membuktikan bahwa semakin besar adopsi teknologi dan inovasi digital di berbagai sektor ekonomi, semakin positif kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi

nasional. Sebaliknya, ekonomi hijau ditemukan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode yang sama. Temuan ini menunjukkan adanya potensi *trade-off* jangka pendek antara penerapan praktik ekonomi hijau dan pertumbuhan ekonomi konvensional.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Anwar (2022), membuktikan bahwa Ekonomi hijau mampu mendorong inovasi teknologi yang mendukung penerapan strategi ramah lingkungan secara berkelanjutan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan memanfaatkan kembali limbah dari berbagai aktivitas ke dalam proses produksi, sehingga dapat mengurangi polusi. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan penerapan kebijakan ekonomi hijau sebagai alternatif. Kebijakan ini mencakup alokasi sumber daya ekonomi yang lebih efektif, penguatan regulasi lingkungan, pemberian subsidi untuk aktivitas yang mendukung kelestarian lingkungan, serta optimalisasi dalam perencanaan tata ruang. Sebuah kerangka ekonomi baru perlu dirancang agar kebijakan ini dapat diterapkan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, ekonomi hijau berupaya mengurangi tingkat kemiskinan dengan melibatkan kelompok masyarakat rentan dalam upaya pembangunan ekonomi yang tetap mempertahankan keseimbangan lingkungan alam dan sosial.

Pemerintah harus memimpin dalam mendorong transisi menuju ekonomi hijau. Ini adalah kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Khair & Sartika (2024). Selain itu, pendekatan holistik yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi hal yang sangat krusial. Implementasi kebijakan ekonomi hijau perlu didukung oleh berbagai pihak terkait untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam seluruh dimensi tersebut. Dengan mengelola sumber daya alam secara bijak, mendorong inovasi berwawasan lingkungan, dan memajukan praktik keuangan berkelanjutan, pemerintah dapat mendukung proses transisi menuju ekonomi hijau yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Dalam membahas dampak inklusi keuangan terhadap ekonomi hijau di Ibu Kota Nusantara (IKN), ada beberapa aspek yang harus dikaji secara mendalam, terutama dalam kaitannya dengan akses ke layanan keuangan, kebijakan ekonomi berkelanjutan, dan perkembangan infrastruktur hijau di IKN. Beberapa tema utama dalam pembahasan ini meliputi:

### **1. Peran Inklusi Keuangan dalam Mendorong Ekonomi Hijau di IKN**

Inklusi keuangan memiliki peran penting dalam mendorong transisi menuju ekonomi hijau di IKN. Akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan, terutama bagi masyarakat lokal, pelaku UMKM, dan sektor informal, memungkinkan peningkatan partisipasi dalam proyek-proyek ekonomi berkelanjutan. Melalui inklusi keuangan, masyarakat dapat mengakses pembiayaan untuk kegiatan yang mendukung inisiatif hijau, seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan bisnis ramah lingkungan. Di IKN, penerapan inklusi keuangan yang efektif akan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

## **2. Dampak Inklusi Keuangan terhadap Pembiayaan Hijau di IKN**

Salah satu kontribusi utama dari inklusi keuangan adalah mendukung pembiayaan hijau, yang mencakup proyek-proyek energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan sampah yang lebih efisien. Bagi IKN, pembiayaan hijau yang inklusif memungkinkan lebih banyak proyek hijau di berbagai sektor. Bank dan lembaga keuangan syariah memiliki potensi untuk menawarkan produk-produk pembiayaan hijau yang sesuai dengan prinsip syariah, menarik lebih banyak investor dan nasabah yang peduli terhadap kelestarian lingkungan.

## **3. Peran Teknologi Keuangan (*Fintech*) dalam Mendukung *Green Economy***

Inklusi keuangan berbasis teknologi, seperti *fintech* syariah, memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi hijau di IKN. Melalui inovasi teknologi keuangan, masyarakat di IKN, termasuk yang berada di daerah terpencil, dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan yang mendukung keberlanjutan. *Fintech* syariah dapat menawarkan berbagai produk pembiayaan hijau, seperti pinjaman untuk proyek energi terbarukan, pengelolaan air, dan investasi ramah lingkungan lainnya. Selain itu, *fintech* juga dapat memberikan kemudahan dalam transaksi digital yang efisien dan rendah emisi, sejalan dengan visi pembangunan kota hijau.

## **4. Tantangan dalam Implementasi Inklusi Keuangan untuk Mendukung Ekonomi Hijau**

Meskipun inklusi keuangan menawarkan banyak peluang untuk mendukung *green economy* di IKN, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat lokal, terutama terkait dengan layanan keuangan yang mendukung proyek hijau. Literasi keuangan adalah pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan mereka sendiri (Dwiyanti & Ahmadi, 2024). Oleh karena itu, apabila hal tersebut rendah, akan sulit untuk melakukan sosialisasi terkait ekonomi hijau. Selain itu, infrastruktur keuangan di wilayah-wilayah tertentu di IKN mungkin belum memadai untuk mendukung akses yang lebih luas ke layanan keuangan hijau. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu berkolaborasi dalam mengatasi hambatan ini dengan meningkatkan edukasi keuangan dan memperluas jaringan layanan keuangan berbasis teknologi di IKN.

## **5. Peluang dan Dukungan Kebijakan untuk Pengembangan Ekonomi Hijau di IKN**

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan ekonomi hijau di IKN melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang inklusif. Dukungan ini mencakup insentif pajak untuk proyek-proyek hijau, regulasi ramah lingkungan, serta kebijakan yang mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan hijau. Selain itu, dengan adanya kerjasama internasional dalam pengembangan ekonomi hijau, IKN memiliki peluang besar untuk menarik investasi hijau dari berbagai pihak. Inklusi keuangan yang dioptimalkan dapat mempercepat implementasi proyek-proyek hijau dan mendorong transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan di IKN.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Peran inklusi keuangan dalam mendukung *green economy* di Ibu Kota Nusantara (IKN) sangat penting dalam memastikan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Akses ke layanan keuangan memungkinkan masyarakat lokal, terutama pelaku UMKM, untuk terlibat dalam proyek-proyek hijau, seperti penggunaan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan bisnis ramah lingkungan. *Fintech* dan inovasi keuangan berbasis teknologi dapat memperluas jangkauan layanan keuangan, khususnya di wilayah terpencil, dan mendukung terciptanya ekosistem ekonomi hijau yang lebih inklusif. Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan dan kurangnya infrastruktur keuangan perlu diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan.

Saran yang diberikan meliputi peningkatan literasi keuangan terkait layanan hijau bagi masyarakat di IKN, pengembangan infrastruktur keuangan yang lebih luas melalui *fintech* untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mendukung proyek-proyek hijau. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan insentif bagi proyek berkelanjutan, termasuk melalui pembiayaan hijau berbasis syariah dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau di IKN.

## LIMITASI PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini menggunakan data sekunder dari literatur dan laporan yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini di lapangan terkait penerapan inklusi keuangan dan ekonomi hijau di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kedua, data primer seperti wawancara langsung atau survei lapangan tidak dilakukan, yang dapat membatasi pemahaman lebih mendalam tentang persepsi masyarakat lokal terhadap inklusi keuangan dan ekonomi hijau. Terakhir, penelitian ini belum mempertimbangkan faktor politik dan regulasi spesifik yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi hijau di IKN.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, M. (2022). GREEN ECONOMY SEBAGAI STRATEGI DALAM MENANGANI MASALAH EKONOMI DAN MULTILATERAL. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4, 343–356.
- Ardita, V. Y., & Ahmadi, M. A. (2024). *Green Finance Sebagai Pendukung Keberlanjutan Ekonomi: Analisis Konsep Dan Implementasi*. 1, 37–46.
- Arifin, A. (2024). CREATING A SUSTAINABLE DIGITAL BUSINESS ECOSYSTEM: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR GLOBAL ECONOMIC DEVELOPMENT. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 9.
- Aulya, F., Zulfa, N., Putri, B. A., & Permatasari, D. (2024). *Stimulating National Economic Growth Through Synergy of Digital Innovation and Green Economy Memacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Sinergi Inovasi Digital dan Ekonomi Hijau*. 3(9), 1945–1958.
- BCA. (2023). *Mengenal Apa Itu Inklusi Keuangan*. BCA. <https://www.bca.co.id/id/informasi/Edukatips/2023/02/20/08/28/mengenal-apa-itu-inklusi-keuangan>
- Durai, D. T., & Stella, G. (2019). *Digital Finance and Its Impact on Financial Inclusion*. Research Gate. [https://www.researchgate.net/publication/330933079\\_DIGITAL\\_FINANCE\\_AND\\_ITS\\_IMPACT\\_ON\\_FINANCIAL\\_INCLUSION#full-text](https://www.researchgate.net/publication/330933079_DIGITAL_FINANCE_AND_ITS_IMPACT_ON_FINANCIAL_INCLUSION#full-text)
- Dwiyanti, H., & Ahmadi, M. A. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Pendapatan dan Toleransi Risiko terhadap Keputusan Investasi. *Journal of Exploratory Dynamic Problems*, 04(03), 160–169. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSBM/article/view/1488>
- He, L., Liu, R., Zhong, Z., Wang, D., & Xia, Y. (2019). Can green financial development promote renewable energy investment efficiency? A consideration of bank credit. *Renewable Energy*, 143, 974–984. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.05.059>
- Khair, O. I., & Sartika, I. (2024). Ekonomi Hijau: Perspektif Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Berkelanjutan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 1352–1363.
- Lumbanraja, P. C. (2023). Analisis Variabel Ekonomi Hijau (Green Economy Variable) Terhadap Pendapatan Indonesia (Tahun 2011-2020) dengan Metode SEM-PLS. *Cendekia Niaga*, 7(1), 61–73. <https://doi.org/10.52391/jcn.v7i1.836>
- Merino-Saum, A., Clement, J., Wyss, R., & Baldi, M. G. (2020). Unpacking the Green Economy concept: A quantitative analysis of 140 definitions. *Journal of Cleaner Production*, 242. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118339>
- OJK. (n.d.). *BULAN INKLUSI KEUANGAN: WUJUDKAN AKSES KEUANGAN UNTUK SEMUA*. Otoritas Jasa Keuangan. <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10532>
- Schiffer, M., & Weder, B. (2001). Firm Size and the Business Environment: Worldwide Survey Results. *World Bank Publications*, 43.
- Souad, H. (2023). The Green Economy as a Solution for Sustainable Development. *Humanities and Management Sciences - Scientific Journal of King Faisal University*, 1–7. <https://doi.org/10.37575/h/geo/230008>

- Srivastava, A. K., Dharwal, M., & Sharma, A. (2020). Green financial initiatives for sustainable economic growth: A literature review. *Materials Today: Proceedings*, 49(xxxx), 3615–3618. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.08.158>
- Sulistiyowati, L. N. (2024). PERSEPSI ISTILAH " GREEN " DALAM GREEN FINANCIAL DAN. *WIRYAKARYA Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 03.
- Suparmoko, M. (2020). Pembangunan Nasional Dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(1), 39–50.
- UNEP. (n.d.). *Ekonomi Hijau*. United Nations Environment Programme. <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy>
- Wisnubroto, K. (2023). *Implementasi IKN Kota Cerdas*. Indonesia.Go.Id Portal Informasi Indonesia. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7747/implementasi-ikn-kota-cerdas?lang=1>